PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota di Jawa Barat)

Inta Budi Setya Nusa
Ajeng Calia Damayanti
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Abstract

Local revenue is revenue or sources of revenue derived from the region itself is collected in accordance with applicable regulations. Meanwhile, a source of local revenue. Capital expenditure is an expenditure made by the government for use in the government activities that have a useful life of one year book. This study aims to provide empirical evidence about the influence of the local revenue and its implications on Capital Expenditures.

The population in this study are 9 cities in the Local Government in West Java Province. The sample selection is done by using a saturated sample or census because the population is less than 30 units in which all the population being sampled. The analytical method used is descriptive analysis and verification. This study analyzed using path analysis equation. So it can be known how much the relationship of correlation and determination of variables to be concluded.

The results of hypothesis testing showed that (1) the local taxes has a very strong effect on local revenues and (2) the local revenue has strong effect Capital Expenditures.

***Keywords**: Local Taxes, Revenue, and Capital Expenditures*

I. Pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelititan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia kini memasuki era baru dalam manjemen keuangan pemerintah daerahnya seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menitikberatkan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Handayani dan Elva:2012).

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD . Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis (Putro:2011:3).

Kegiatan Belanja modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat (Halim:2014:228-229).

Adapun Sumber pembiayaan termasuk Belanja modal yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Kusnandar dan Siswantoro:2011).

Namun berdasarkan fenomena yang terjadi pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan Pemerintah daerah ke Departemen Keuangan tahun anggararan 2007-2011 PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya, Pada tahun 2007 PAD mencapai angka 35.546 (dalam milyaran rupiah) dengan presentase 13%, pada tahun 2008 mencapai angka 64.746 (dalam milyaran rupiah) atau sama dengan 18%, tahun 2009 67.457 (dalam milyaran rupiah) atau sama dengan 17%, tahun 2010 mencapai 71.852 (dalam milyaran rupiah) atau sama dengan 18% dan tahun 2011 mencapai angka 87.674 (dalam milyaran rupiah) atau 20%. Namun kenaikan itu tidak diikuti dengan belanja modal pada tahun 2010 yang justru malah mengalami penurunan dari angka 104.614 (dalam milyaran rupiah) atau 25% pada tahun 2009 menjadi 96.170 (dalam milyaran rupiah) pada tahun 2010 atau 22% (www.djpk.kemenkeu.go.id). Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Fenomena lain yang tejadi adalah di Jawa Timur, APBD TA 2014 tidak berpihak kepada masyarakat karena belanja modal justru malah turun 9,68% sementara PAD mengalami kenaikan 51,37%. Kenaikan PAD tidak diimbangi kenaikan pengeluaran untuk kepentingan Publik (*Jember, 13 Nopember 2013, sumber : beritajatim.com, oleh : Bukri, Ketua Fraksi PDIP Indonesia Raya DPRD Jember beritajatim.com:2013*).

Oleh karena itu pemerintah perlu mengawasi langsung atas alokasi dana yang akan digunakan oleh pemerintah daerah supaya bisa terkontrol. PAD memiliki peran penting dalam hal ini.

Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah (Kusnandar dan Siswantoro:2011).

Namun, Fenomena yang terjadi di Aceh, minimnya penerimaan PAD terjadi karena minimnya jumlah industri. Selain itu, pajak-pajak yang diberikan pusat kepada daerah umumnya adalah pajak kering, yang pertumbuhannya sangat rendah, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB), permukaan air tanah, pajak BBM. Sementara sumber pajak yang gemuk seperti migas dan bahan tambang lainnya ditangani pemerintah pusat (*Aceh, 26 Oktober 2013, sumber : Serambi Indonesia, oleh : Syukri, Pakar Ekonomi Unsyiah*).

Oleh karena itu perlu ada upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi, maksudnya agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat tetapi harus mampu mandiri sesuai dengan cita-cita (Halim:2014:168).

PAD berasal dari pajak daerah, karena pajak daerah merupakan bagian PAD yang terbesar kemudian disusul oleh retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya (Suparmoko:2002:55). Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Saputra, Shaleh dan Wachid:2011).

Namun, dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah bukanlah tanpa masalah (Halim:2014:169). Pada saat Pajak daerah meningkat justru terjadi penurunan PAD seperti halnya yang terjadi di Sumatera Barat. Dana bagi hasil cukai rokok sebesar Rp 48 Milyar hanya 50% difokuskan pada bidang kesehatan, sisanya tidak tahu digunakan untuk apa *(Padang, 26 Juni 2013, sumber : Padang Express, oleh : Dedi Edwar, Fraksi Hanura)*.

Fenomena lain juga menyatakan adanya penyimpangan mengenai pengelolaan pajak reklame di wilayah kota Medan sehingga merugikan daerah minimal Rp 18,4 milyar. Hal ini disebabkan mudahnya mendapatkan blangko Surat Penetapan Pajak Reklame (SPPR) sehingga siapapun dapat melakukan pengurusan ijin dengan mudah. Beberapa perusahaan menjadi korban tindakan penggelapan dana tersebut *(Medan, 26 Juli 2010, sumber : Harian Seputar Indonesia, laporan temuan BPK).*

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan konsep-konsep tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut : **"Pengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Implikasinya Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat)".**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh Pajak Derah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Implikasinya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat".

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini untuk mempelajari dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja modal terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penerapan terapan (*Apllied Research*) bertujuan memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menuntut solusi tepat waktu (Sekaran, 2000:3).

1.4.2 Kegunaan Akademik

Penelitian dasar (*Basic Research*) yang menuntut solusi tepat waktu dilakukan untuk menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami bagaimana masalah tertentu yang terjadi dala organisasi (Sekaran,2000:3).

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pajak Daerah

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011:77) menyatakan:

"Pajak daerah yaitu kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman".

Menurut Dr.Oyok Abuyamin (2012:360) menyatakan:

"Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Darise (2008 : 135-136) menyatakan :

"Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi bukan sebagai suatu sanksi hukuman.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2014 : 169) menyatakan :

"Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah."

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004, definisi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

"Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18)."

Menurut Suparmoko (2002 : 55) menyatakan :

"Pendapatan daerah adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah."

Maka dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan atau sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Belanja Modal

Menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan :

"Belanja modal merupakan bagian dari kelompok daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya".

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 107), menyatakan:

"Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya".

Menurut Arif, Muchlis dan Iskandar (2009 : 186), menyatakan:

"Belanja modal merupakan belanja yang tidak habis satu tahun atau menghasilkan aset tetap pemerintah".

Maka dari definisi diatas dapat diartikan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang mempunyai masa manfaat satu tahun buku.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan bernegara yang layak pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan oleh swasta. Pajak daerah

berperan sebagai pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*) (Suparmoko:2002:71).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2014 : 169).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko:2002:55).

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.Selain itu Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani:2003 dalam Putro:2011).

2.2.1. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata – rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah (Halim:2014:169).

Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli daerah yang terbesar kemudian disusul dengan pendapatan Asli daerah yang berasal dari retribusi daerah (Suparmoko:2002:55).

Berdasarkan penelitian Isroy dan Nurul (2012) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pajak daerah, retribusi daerah, dan otonomi daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Padang.

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah rumah tangga serta jumlah pemasangan reklame (Rahdina:2008 dalam Ruswandi:2009).

2.2.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

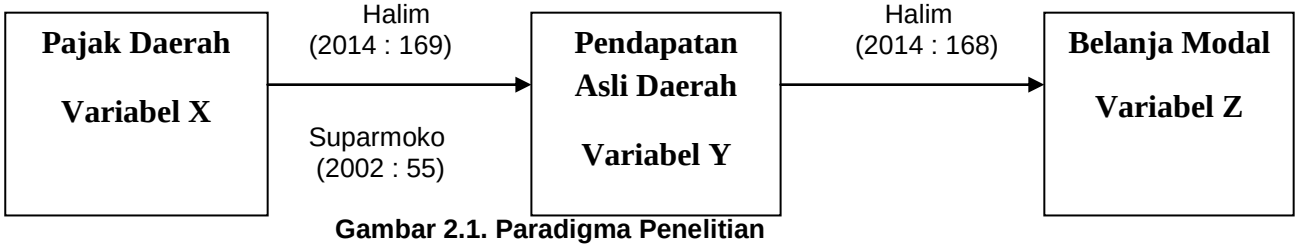
Manajemen keuangan sektor publik secara sederhana didefinisikan yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya. Pendapatan asli daerah sebagian akan dialokasikan untuk belanja modal (Halim, 2014 : 168).

Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya termasuk belanja modal. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan digunakan untuk mencapai target belanja yang akan dicapai (Bahtiar Arif,dkk:2009:171).

Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh (Kusnandar dan Siswantoro:2011).

Yulia Yustikasari & Darwanto (2006) dalam Putro (2011) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis membuat sebuah kerangka pemikiran seperti dibawah ini :



Gambar 2.1. Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) mengungkapkan pengertian hipotesis:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :
H1 = Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

III. Metode Penelitian

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian ilmiah. Beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai objek penelitian adalah sebagai berikut:
Menurut Sugiyono (2011:32), menyatakan:
"Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan".
Menurut Husein Umar (2005:303), menyatakan:
"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Pemerintah Daerah.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu rumusan masalah. Data yang dibutuhkan merupakan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, data tersebut dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Metode Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel Pajak Daerah (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) dan implikasinya terhadap Belanja Modal (Z).

3.3. Desain Penelitian

Sebelum menjalankan penelitian diperlukan suatu desain penelitian agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan baik dan sistematis. Desain penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pada proses penelitian
Menurut Umi Narimawati (2010:30), menyatakan:
"Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu".

3.4. Operasionalisasi Varibel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian**.**
Menurut Nur Indriantoro dalam Umi Narimawati (2010:31), menyatakan:
"Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indicator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Variabel bebas (*Independence variable)*
   Menurut Juliansyah Noor (2011:49),
   "Variabel bebas atau *Independence variable* merupakan varaibel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat".
   Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan variabel bebas (Y) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner yang berupa diajukan kepada responden.
2. Variabel terikat (*dependent variable)*
   Menurut Robbins dalam (Juliansyah Noor, 2011 :49) mengungkapkan definisi variabel terikat sebagai berikut :
   "Variabel terikat atau *dependent variable* merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain".

Variabel terikat (Z) yang digunakan adalah belanja modal. Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Sesuai dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan implikasinya terhadap Belanja Modal, maka dapat disajikan dalam operasionalisasi variabel pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Sumber
1	Pajak Daerah (X)	"Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daeah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat " **(Dr.Oyok Abuyamin, 2012:360)**	1. Pajak Daerah Tingkat I 2. Pajak Daerah Tingkat II **(UU No. 34 tahun 2000 yang mengalami perubahan pengaturan UU No.28/2009)**	Rasio	LRA
2	Pendapatan Asli Daerah (Y)	"Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah". **(Halim,2014 : 169)**	1.Pajak Daerah	Rasio	LRA
			2.Retribusi Daerah		
			3.BUMD		
			4.Pengelolaan Kekayaan daerah		
			(Halim,2014:169)		
3	Belanja Modal (Z)	"Belanja modal merupakan bagian dari kelompok daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya" **(Permendagri No. 13 2006)**	1. Belanja Modal Perolehan Tanah	Rasio	LRA
			2. Belanja Modal Peralatan dan mesin		
			3. Belanja Modal gedung dan bangunan		
			4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 5. Belanja modal fisik lainnya **(PP No. 71 2010)**		

Penelitian ini menggunakan skala rasio. Pengertian skala rasio Menurut Siagian,dkk (2006:19-24) adalah sebagai berikut:

"Skala rasio merupakan semua ukuran (ordinal, interval, nominal) ditambah suatu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur".

3.5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Uma Sekaran (2006 : 60) mendefinisikan data sekunder sebagai berikut: “Data Sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada”

.Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi berupa Gambaran umum instansi, aktivitas serta dokumen-dokumen terkait dengan penelitian dari Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat.

3.6. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:161) pengertian populasi adalah sebagai berikut:
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemdian ditarik kesimpulannya”.
Sedangkan pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:
“Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unitpengamatan dalam penelitian”.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah cara pengambilan sampel dengan mengambil semua anggota populasi menjadi sampel jika dinyatakan ternyata populasi menyatakan kurang dari 30 (Sugiono:2011:118-127). Sampel yang digunakan adalah keseluruhan populasi yaitu Pemerintah Daerah kota Provinsi Jawa Barat.

3.7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan *(Library Reseach)* dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

3.8. Metode Pengujian Data

3.8.1. Rancangan Analisis data Deskriptif

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variabel penelitian.

3.8.2 Rancangan Analisis data Verifikatif

Dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan, adalah metode verifikatif. Verifikatif adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik.

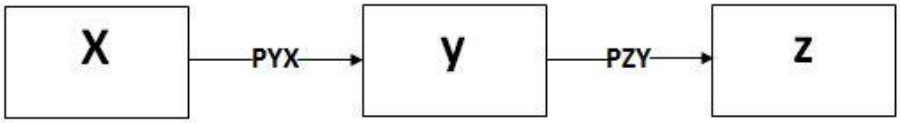
Metode verifikatif menurut Mashuri (2009:45) menyatakan:
“Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Menurut Umi Narimawati(2010:46), yaitu:
“Analisis Data Verifikatif adalah Data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner akan diolah dengan pendekatan kuantitatif”.

Selanjutnya analisis yang digunakan dalam metode penelitian verifikatif adalah :

1. Analisis jalur (*Path Anlysis)*

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif juga menggunakan metode verifikatif. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik, yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Model analisis jalur, adalah sebagai berikut:



Keterangan :
Z = Belanja Modal
Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X = Pajak Daerah
PYX = Koefisien jalur Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PZY = Koefisien jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujiannya menggunakan pendekatan koefisien korelasi *Pearson* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum y)}{\sqrt{\{n\left(\sum Xi^2\right) - (\sum Xi)^2\}\{n\left(\sum yi^2\right) - (\sum yi)^2\}}}$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:49)

dimana : -1≤ *r* ≤+1
r = koefisien korelasi
x = Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah
z = Belanja Modal
n = jumlah responden

Ketentuan untuk melihat tingkat keeratan korelasi digunakan acuan pada tabel 3.2:

Tabel 3.2
Tingkat Keeratan Korelasi

0 – 0.20	Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
0.21 – 0.40	Korelasi yang lemah
0.41 – 0.60	Korelasi sedang
0.61 – 0.80	Cukup tinggi
0.81 – 1	Korelasi tinggi

3. Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variabel bebas atas nilai variabel bebas ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi variabel terikat. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan Microsoft Excel/SPSS atau secara manual didapat dari R2=SSreg/Sstot.

$$Kd = r^2 \, x \, 100\%$$

Dimana :
d = Koefisien Determinasi
r = Koefisien Korelasi

3.8.2 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal, serta Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Implikasinya terhadap Belanja Modal. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan *path* analisis.

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil penelitian maka perlu dilakukan dengan Uji t (Uji Parsial). Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan implikasinya terhadap Belanja Modal.

Melakukan uji-t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut:

a. Rumus uji t yang digunakan adalah:

$$r = \frac{R_{YX1}}{\sqrt{\left[\frac{(1 - R^2 XY \ldots . Xk) CRii}{(n - k - 1)}\right]}} \quad I = 1,2,3 \ldots$$

Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

b. Hipotesis

H_0 ; ρ = 0, pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H_a ; ρ ≠ 0, Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
H_b ; ρ = 0, Penerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh pada Belanja Modal.
H_c ; ρ ≠ 0, Penerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada Belanja Modal.

c. Kriteria Pengujian
H_0 ditolak apabila t_{hitung} < dari t_{tabel} (α = 0,05)
Kriteria Penarikan Pengujian:
Jika menggunakan tingkat kekeliruan (= 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. Jika t_{hitung} ≥ t_{tabel} maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
b. Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel} maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.
c. Jika t_{hitung} ≥ t_{tabel} maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel Y dan variabel Z ada hubungannya
d. Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel} maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel Y dan variabel Z tidak ada hubungannya

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Deskriptif

4.1.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah kota di Provinsi Jawa Barat, tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012 yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Ringkasan Pajak Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2012 (dalam milyaran)

Kota	Pajak Daerah				Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	
Kota Bogor	56.027.944	51.792.257	165.396.746	150.067.564	105.821.128
Kota Bandung	250.338.673	290.264.385	667.106.812	571.200.000	444.727.468
Kota Cirebon	19.594.448	18.746.076	46.129.882	40.803.130	31.318.384
Kota Bekasi	99.031.556	159.112.237	375.978.082	387.037.196	255.289.768
Kota Depok	55.796.345	54.658.091	202.203.952	273.661.551	146.579.985
Kota Cimahi	17.088.579	16.712.525	42.613.534	40.278.000	29.173.160
Kota Tasikmalaya	9.583.828	13.017.340	24.985.155	25.802.995	18.347.330
Kota Sukabumi	6.596.173	6.561.757	15.222.703	14.108.365	10.622.250
Kota Banjar	1.879.545	1.606.237	3.374.558	2.561.600	2.355.485
Min	1.879.545	1.606.237	3.374.558	2.561.600	2.355.485
Max	250.338.673	290.264.385	667.106.812	571.200.000	444.727.468
Rata-rata	57.326.343	68.052.323	171.445.714	167.280.045	116.026.106
Perkembangan	0	18,71	151,93	-2,43	-

Tabel di atas menjelaskan tentang gambaran pajak daerah di Pemerintah Daerah Kota Provinsi Jawa Barat untuk per tahun anggaran. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 rata-rata pajak daerah yang

diperoleh adalah sebesar Rp. 57.326.343 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 18,71% menjadi Rp. 68.052.323, pada tahun 2011 pajak daerah mengalami peningkatan kembali sebesar 151,93% menjadi Rp. 171.445.714 dan pada tahun 2012 pajak daerah mengalami penurunan sebesar -2,43% menjadi Rp 167.280.045.

4.1.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah kota di Provinsi Jawa Barat, tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012 yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Ringkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012 (dalam Milyaran)

Kota	Pendapatan Asli Daerah				Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	
Kota Bogor	125.313.316	112.203.927	230.449.645	211.013.607	169.745.124
Kota Bandung	360.152.627	412.183.525	833.254.175	755.459.217	590.262.386
Kota Cirebon	77.318.390	81.590.081	120.130.531	140.537.930	104.894.233
Kota Bekasi	231.694.925	310.859.563	568.344.299	557.902.282	417.200.267
Kota Depok	115.720.348	103.379.140	282.747.545	351.311.358	213.289.598
Kota Cimahi	75.037.372	78.719.419	116.677.730	110.095.908	95.132.607
Kota Tasikmalaya	76.503.523	95.412.668	110.369.866	112.400.065	98.671.531
Kota Sukabumi	66.190.681	66.558.170	115.473.387	117.584.284	91.451.631
Kota Banjar	28.011.890	28.647.930	45.952.392	41.829.799	36.110.503
Min	28.011.890	28.647.930	45.952.392	41.829.799	36.110.503
Max	360.152.627	412.183.525	833.254.175	755.459.217	590.262.386
Rata-rata	128.438.119	143.283.825	269.266.619	266.459.383	201.861.987
Perkembangan	0	11,56	87,93	-1,04	-

Tabel di atas menjelaskan tetang gambaran pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kota di provinsi Jawa Barat untuk per tahun anggaran. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 rata-rata pendapatan asli daerah yang diperoleh adalah sebesar Rp. 128.438.119 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 11,56% menjadi Rp. 143.283.825, pada tahun 2011 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan kembali sebesar 87,93% menjadi Rp. 269.266.619 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar -1,04% menjadi Rp 266.459.383

.

4.1.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Daerah kota di Provinsi Jawa Barat, tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012 yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Ringkasan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012 (dalam Milyaran)

Kota	Belanja Modal				Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	
Kota Bogor	108.449.609	204.772.164	132.952.958	259.422.527	176.399.315
Kota Bandung	390.988.308	582.480.337	612.081.890	1.036.657.108	655.551.911
Kota Cirebon	92.022.318	93.742.636	140.011.150	92.391.553	104.541.914
Kota Bekasi	342.503.050	388.107.026	323.903.766	682.922.676	434.359.130
Kota Depok	239.253.505	226.292.719	295.461.326	548.327.039	327.333.647
Kota Cimahi	95.247.306	80.929.612	102.870.919	152.023.261	107.767.775
Kota Tasikmalaya	118.847.625	137.440.868	104.450.591	63.437.962	106.044.262
Kota Sukabumi	120.425.783	56.097.599	56.290.978	70.287.266	75.775.407
Kota Banjar	104.072.768	54.126.708	151.418.341	83.916.888	98.383.676
Min	92.022.318	54.126.708	56.290.978	63.437.962	75.775.407
Max	390.988.308	582.480.337	612.081.890	1.036.657.108	655.551.911
Rata-rata	179.090.030	202.665.519	213.271.324	332.154.031	231.795.226
Perkembangan	0	13,16	5,23	55,74	-

Tabel di atas menjelaskan tetang gambaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Kota di provinsi Jawa Barat untuk per tahun anggaran. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 rata-rata belanja daerah yang diperoleh adalah sebesar Rp. 179.090.030 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 13,16% menjadi Rp.202.665.519, pada tahun 2011 belanja daerah mengalami peningkatan kembali sebesar 5,23% menjadi Rp. 213.271.324 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 55,74% menjadi Rp 332.154.031.

4.1.2. Analisis Verifikatif

Pada bagian ini akan uraikan hasil analisis verifikatif mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan implikasinya terhadap belanja modal.

Untuk menjawab permasalah tersebut akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang akan disajikan dalam dua sub struktur. Untuk sub strukur pertama akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sub struktur kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

4.1.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan menggunakan Software SPSS, diperoleh koefisien jalur sub struktur pertama sebagai berikut:

Tabel 4.4
Koefisien Jalur Sub Struktur Pertama
Coefficients[a]

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
6.202E7	5443112.538		11.394	.000
1.205	.027	.991	44.174	.000

Berdasarkan tabel output di atas diperoleh koefisien jalur P_{yx}= 0,991. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi.

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi Sub Struktur Pertama
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991[a]	.983	.982	2,65669E7

a. Predictors: (Constant), x

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai ryx sebesar 0,991 yang lainnya sama dengan koefisien jalur yang telah disajikan sebelumnya. Dengan demikian maka koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

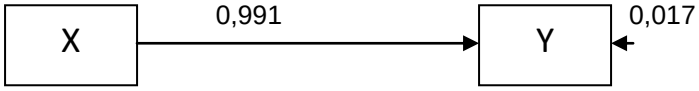
$$KD = 0{,}991^2 \times 100\% = 98{,}3\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 98,3%, sedangkan sisanya sebesar 1,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Dengan demikian maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = 0{,}991X + 0{,}017$$

Jika digambarkan, persamaan di atas tampak sebagai berikut:



Gambar 4.1
Koefisien Jalur Sub Struktur Pertama

4.1.2.2 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : pyx= 0 Artinya, pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H_a : pyx≠ 0 Artinya, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya

Untuk menguji hipotesis diatas maka dilakukan pengujian dengan uji-t dua pihak dengan menggunakan rumus:

Tol

$$t_1 = r_1 y \sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_1 y^2)}}$$

dan

$$t_2 = r_2 y \sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_2 y^2)}}$$

$t_{(\alpha/2;n-k-1)}$

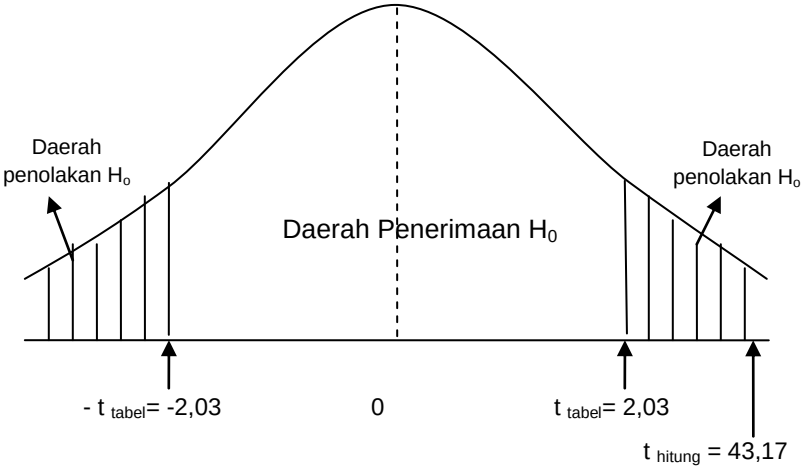
Uji t parsial untuk variabel pajak daerah terhadap PAD :

$$t = 0{,}991\sqrt{\frac{36-1-1}{(1-0{,}991*0{,}991)}} = 43{,}17$$

Tabel 4.6
Pengujian Hipotesis Parsial

Koefisien Jalur	t-hitung	t-tabel	Kesimpulan
X = 0.991	43,17	2,03	Ho Ditolak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel pajak daerah sebesar 43,17. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=36-1-1=34, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,03. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t_{-hitung}$ untuk variabel pajak daerah sebesar 43,17, lebih besar dari nilai t_{-tabel} (-2,03 atau 2,03), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah .



Gambar 4.2 Kurva Uji-t Dua Pihak X ke Y

4.1.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal

Dengan menggunakan Software SPSS, diperoleh koefisien jalur sebagai berikut:

Tabel 4.7
Koefisien Jalur Sub Struktur Kedua
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	-4.677E10	3.198E10		-1.462	.153	-1.118E11	1.822E10
	Y	356.744	113.292	.475	3.149	.003	126.507	586.980

a. Dependent Variable: z

Berdasarkan tabel output di atas diperoleh koefisien jalur P_{zy}= 0,475. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi.

Berikut adalah nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi hasil output SPSS:

Tabel 4.8

Koefisien Determinasi Sub Struktur Kedua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.475[a]	.226	.203	1,34108E11

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai r_{zy} sebesar 0,475 yang lainnya sama dengan koefisien jalur yang telah disajikan sebelumnya. Dengan demikian maka koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

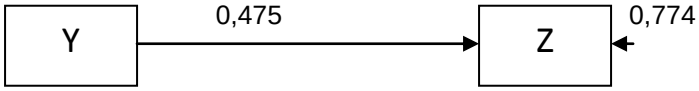
KD = $0,475^2$ X 100% = 22,6%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memberikan konrtribusi pengaruh terhadap belanja modal sebesar sebesar 22,6%, sedangkan sisanya 77,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Dengan demikian maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

Z = 0,475 Y + 0,774

Jika digambarkan, persamaan di atas tampak sebagai berikut:



Gambar 4.3
Koefisien Jalur Sub Struktur Kedua

4.1.2.4 Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : pzy= 0 Artinya, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H_a : pzy≠ 0 Artinya, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya

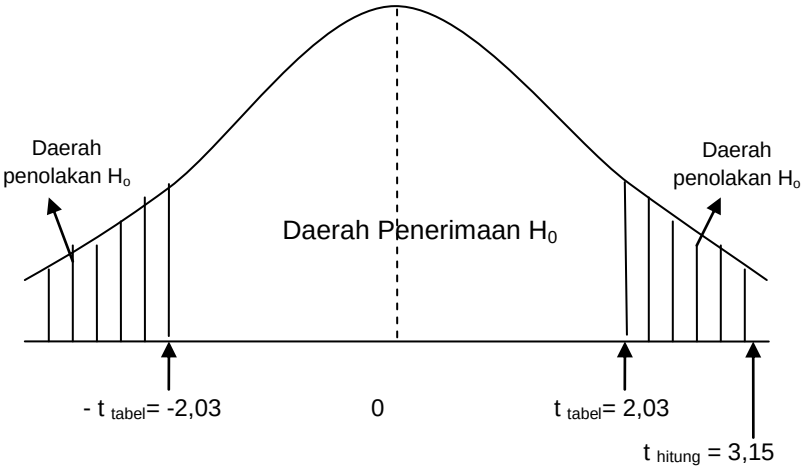
Uji t parsial untuk variabel PAD terhadap Belanja Modal :

$$t = 0,475\sqrt{\frac{36-1-1}{(1-0,475*0,475)}} = 3,15$$

Tabel 4.9
Pengujian Hipotesis Parsial

Koefisien Jalur	t-hitung	t-tabel	Kesimpulan
Y = 0.475	3,15	2,03	Ho Ditolak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,15. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=36-1-1=34, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,03. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t\text{-}_{hitung}$ untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,15, lebih besar dari nilai $t\text{-}_{tabel}$ (-2,03 atau 2,03), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.



Gambar 4.4 Kurva Uji-t Dua Pihak Y ke Z

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah memiliki hubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,991 dengan arah positif. Dengan kata lain, semakin besar pajak daerah , maka semakin besar pula pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemerintah daerah dengan Pajak daerah yang besar ada kecenderungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya pun lebih tinggi. Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana jika pajak daerah lebih banyak dari biasanya maka diharapkan dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pula. Halim (2014:169) bahwa dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata – rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah memberikan pengaruh sebesar 98,3% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan fenomena yang disampaikan oleh Dedi Edwar bahwa pada saat pajak daerah mengalami kenaikan tidak diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sisanya sebesar 0,17% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya retribusi daerah sebagaimana yang dijelaskan oleh Suparmoko (2002:55) bahwa Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli daerah yang terbesar kemudian disusul dengan pendapatan Asli daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Pada variabel pajak daerah ini diperoleh nilai thitung sebesar 43,17 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai thitung sebesar 43,17 lebih besar dari ttabel sebesar 2,03, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isroy dan Nurul (2012) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pajak daerah, retribusi daerah, dan otonomi daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Padang. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah rumah tangga serta jumlah pemasangan reklame (Rahdina:2008 dalam Ruswandi:2009).

Oleh karena itu pajak daerah dalam menentukan pendapatan asli daerah (PAD) bisa optimal pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat periode 2009-2012, maka sebaiknya instansi tersebut perlu memperhatikan dan melakukan tingkat pajak daerah agar tetap stabil yaitu dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat agar lebih patuh dan sadar akan kewajibannya terhadap negara dengan membayar pajak. Hal ini akan meningkatkan pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) pun ikut meningkat. Selain itu pula pemerintah pusat harus mengawasi langsung dana yang masuk ke pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan dengan belanja modal sebesar 0,475 dengan arah positif. Dengan kata lain, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula Belanja Modalnya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bahtiar Arif, dkk (2009:171) bahwa pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja-belanja diantaranya

termasuk belanja modal. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan digunakan untuk mencapai target belanja yang akan dicapai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh sebesar 22,6%. Hal ini sesuai dengan fenomena yang disampaikan Bukri bahwa kenaikan PAD tidak diimbangi kenaikan belanja modal. Sedangkan sisanya 77,4% dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, sisa lebih pembiayaan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (UU No 33 tahun 2004).

Pada variabel pajak daerah ini diperoleh nilai thitung sebesar 3,15 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai thitung sebesar 3,15 lebih besar dari ttabel sebesar 2,03, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Yustikasari & Darwanto (2006) dalam Putro (2011) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal.

Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam menentukan belanja modal bisa optimal pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat periode 2009-2012, maka sebaiknya instansi tersebut perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan penerimaan daerah, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga ketika pendapatan asli daerah meningkat maka pemerintah daerah bisa meningkatkan anggaran belanja modal. Selain itu, agar dalam menentukan belanja modal bisa optimal pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat periode 2009-2012, maka sebaiknya instansi tersebut memperhatikan tingkat penerimaan daerah. Dimana pemerintah pusat harus mengawasi langsung pengalokasian anggaraan belanja modal pemerintah daerah sudah terrealisasi atau belum. Sehingga masyarakat bisa merasakan sendiri manfaatnya.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kota Jawa Barat periode 2010-2012. Hal tersebut menunjukan ketika pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintah Daerah Kota Jawa Barat periode 2010-2012. Hal tersebut menunjukan bahwa pada saat pendapatan asli daerah meningkat maka belanja modal pun akan meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan saran:

5.2.1 Saran Operasional

Adapun saran praktis yang penulis sampaikan yaitu untuk Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Agar pajak daerah dalam menentukan pendapatan asli daerah (PAD) bisa optimal pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat periode 2009-2012, maka sebaiknya instansi tersebut perlu memperhatikan dan melakukan tingkat pajak daerah agar tetap stabil yaitu dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat agar lebih patuh dan sadar akan kewajibannya terhadap negara dengan membayar pajak. Hal ini akan meningkatkan pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) pun ikut meningkat. Selain itu pula pemerintah pusat harus mengawasi langsung dana yang masuk ke pemerintah daerah.
2. Agar pendapatan asli daerah dalam menentukan belanja modal bisa optimal pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat periode 2009-2012, maka sebaiknya instansi tersebut perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan penerimaan daerah, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga ketika pendapatan asli daerah meningkat maka pemerintah daerah bisa meningkatkan anggaran belanja modal. Selain itu, agar dalam menentukan belanja modal bisa optimal pada pemerintah daerah kota di Jawa Barat periode 2009-2012, maka sebaiknya instansi tersebut memperhatikan tingkat penerimaan daerah. Dimana pemerintah pusat harus mengawasi langsung pengalokasian anggaraan belanja modal pemerintah daerah sudah terrealisasi atau belum. Sehingga masyarakat bias merasakan sendiri manfaatnya

5.2.2 Saran Akademik

1. Bagi Pengembang Ilmu

   Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tapi unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

2. Bagi Peneliti Lain
   Diharapkan agar peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa pajak daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpengaruh juga terhadap belanja modal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. ISSN: 0216-8642, Vol. 2, No. 2, p. 17 -32.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia..

Bukri. *APBD Jember 2014 tak berpihak ke Rakyat.* Diakses pada tanggal 13 November 2013 dari *World Wide Web:* www.beritajatim.com.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.*

Dodik Siswantoro dan Kusnandar. 2012. Pengaruh Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi*. Vol 15. Universitas Indonesia.

Darise, Nurul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta:Indeks

Edwar , Dedi. *Pajak Daerah Harus Tepat Sasaran.* Diakses pada tanggal 26 Juni 2013 dari *World Wide Web:* www.padangexpress.com.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. dan M. Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik:* Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 4.

Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Sektor Publik:* Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat

Handayani, Elva Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun**.** *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 1. No 1. Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI Madiun.Madiun

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Indriantoro, Nur. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Kementerian Keuangan. 2011. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).* Diakses dari *World Wide Web:* www.djpk.kemenkeu.go.id

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Masyhuri dan Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian*: Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: PT Refika Aditama.

Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-0164, Vol. 2, No. 2, p. 80-90. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Mohammad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian*: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nugraeni. 2011."Analsis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika Upy*. Vol. 8, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Rambe, Bahreen. *Kasus Pajak Reklame Digantung*. Diakses pada tanggal 26 Juli 2010 dari *World Wide Web :* www.ortax.com

Riduan dan Kuncoro, Engkos Achmad. 2012. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.

Rustiyaningsih, Sri. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintaha Daerah Jawa Timur). *Widya Warta*. ISSN: 0854-1981, No. 2, p. 195-209.

Saputra ,Wendy Dwi, Choirul Saleh, Abdul Wachid. 2011. Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang). *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik*. Universitas Brawijaya. Malang.

Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Bussiness a Akill-Buliding Approach America:Thirt Edition, John Wiley & Sons,Inc.*

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba 4.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.*Jurnal Eksklusif Vol.4 No.4*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Slipi. Jakarta.

Subowo dan Endar Rosita Wati. 2010. Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. ISSN: 2085-3277, Vol. 2, No. 2, p. 73-82. Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan Ke-12*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* : *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-14.

Suratno Putro, Nugroho. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2006-2008). Jurnal Universitas Diponegoro.

Syukri. *PAD vs Penyelewengan.* Diakses pada tanggal 26 Okrober 2013 dari *World Wide Web: www.serambiindonesia.com*

Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Umar,Husein.2011.*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM, Jakarta: Genesis.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.